

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan Kegiatan yang Mengacu Pada Rencana Strategis pada tahun 2023-2026. Laporan Kinerja merupakan hasil capaian kinerja secara ringkas dan lengkap berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2025 Laporan Kinerja disusun dalam bentuk Laporan dengan pendekatan pengukuran kinerja, dimana capaian indikator diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 3 Analisis ini untuk memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon fokus pada upaya peningkatan kinerja.

Demikian laporan ini disusun, Kami berharap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam usaha kinerja dimasa yang akan datang.

Liwa, 28 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat,

Bulki, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001



DAFTAR ISI

COVER

LATAR BELAKANG

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.A Latar Belakang 4

1.B Tugas dan Fungsi..... 5

1.C Struktur Organisasi..... 6

1.D Peran Strategis Perangkat Daerah 7

1.E Isu Strategis 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.A Strategi Arah Kebijakan 8

II.B Program dan Kegiatan..... 11

II.C Perjanjian Kiinerja Tahun 2025 dan Kerangka Pendanaan..... 11

II.D Target Kinerja Menurut Renstra..... 13

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

III.A Analisis Sumber Daya Manusia 19

III.B Analisis Sarana dan Prasarana..... 22

III.C Analisis Dokumen pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 22

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

III.A Capaian Kinerja 22

III.B Perbandingan Kinerja..... 25

III.C Realisasi Anggaran 37

III.D Pemanfaatan Laporan Kinerja 48

BAB V PENUTUP

IV.A Simpulan Umum 53

IV.B faktor pendukung Keberhasilan..... 55

IV.C Permasalahan..... 47

IV.4 Rekomendasi dan Tindak lanjut..... 56

Lampiran

- Rencana Aksi
- Pk 2025 dan perubahannya
- Foto Kegiatan tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
- Sumber Data



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis RPD **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPD yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis RPD **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah..

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pek
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

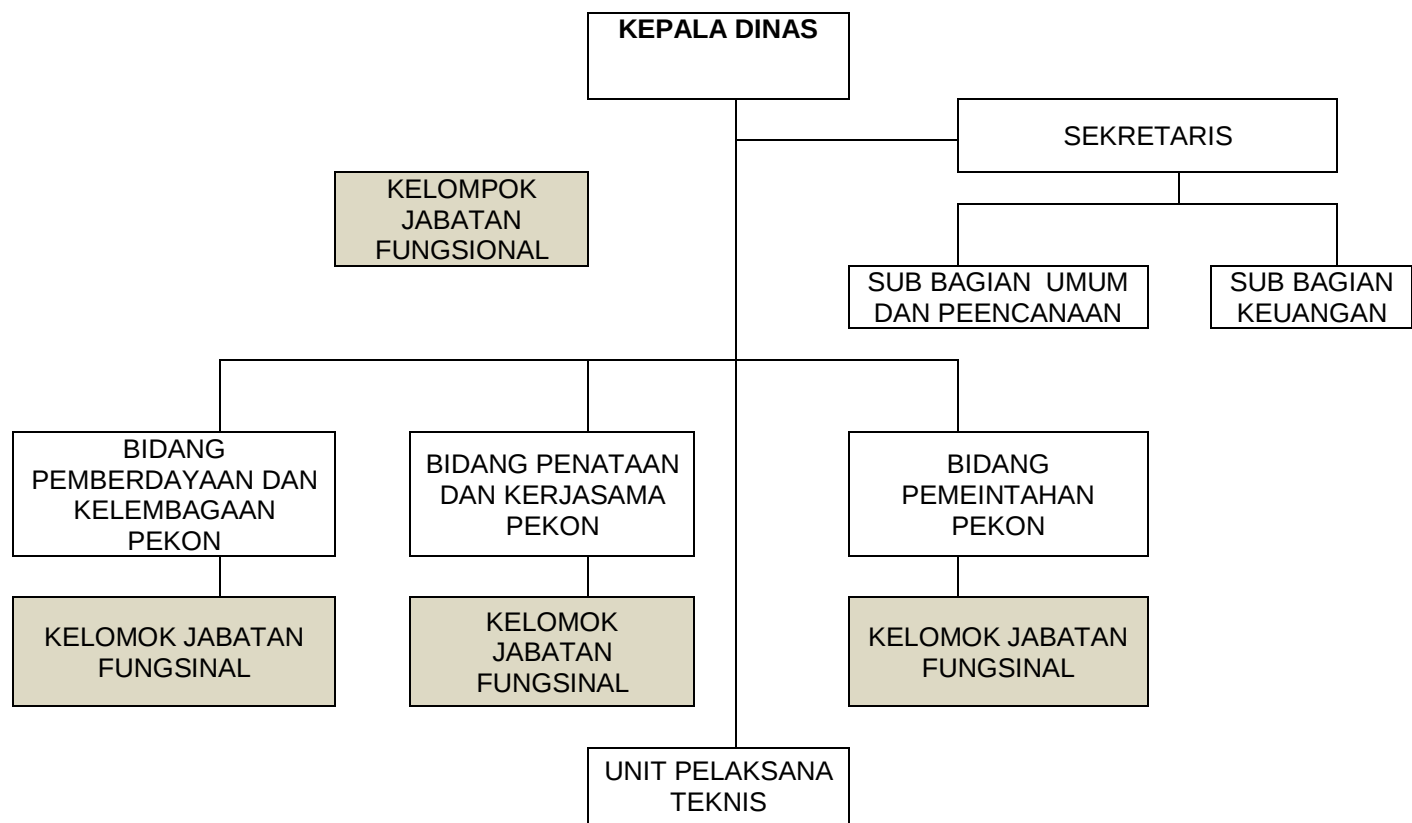
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Kepegawain
 2. Sub Bagian Keuangan.



- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemerintahan Pekon, terdiri atas Kelompo Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Pekont dipimpin oleh BULKI, S.Pd.,MM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan saran dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan saran dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program – program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

E. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pekon;
3. belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan diperdesaan;
4. belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat;
5. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan;
6. rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah pekon;
7. masih kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan;
8. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
9. belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi tepat guna(TTG);
- 10.diberlakukanya undang -undang no 6 tahun 2014 tentang desa di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
- 11.Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimuat program



dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran RPD

Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			
Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan pekon dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan	1.Mendorong kemandirian masyarakat pekon 2.Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga 3.Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2023-2026



B. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon pada satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah
2.13.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.13.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun
2.13.01.2.02.08	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.13.01.05	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
2.13.01.02.05.09	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.13.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.13.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2.13.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi Pemeliharaan Barang Milik
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata
2.13.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sub Organisasi Penyelenggaraan Penataan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama antar pekon utk meningkatkan ekonomi masarakat
2.13.03.2.01	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pekon Tertib Administrasi
2.13.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif
2.13.05.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan kapasitas Kelembagaan

Sumber : Program/ Kegiatan DPA 2025 Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon



Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
Tabel.2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan	TARGET					DEFINISI OPRASONAL
				Fomulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Meningkatnya pemberdayaan Masyarkat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan ecara partisipaif	Prosentase Desa Mandiri	%	Jumlah Desa dengan Status mandiri / Jumlah Desa di Kabupaten Lampung Barat x 100	<i>Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i>	37,40%	39,69 %	41,22%	42,75%	Desa Mandiri desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.Aspek Aspek Perhitungan Desa Mandiri adalah meliputi aspek Ketahanan Sosial, Ekonimi dan Ekologi (Lingkungan) Manfaat ditetapkan Desa Mandiri : 1. Mengukur kemajuan dan keberdayaanDesa 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa 3. Menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ekonomi lokal. 4.Memperkuat budaya dan tradisi lokal. Meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur desa. 6.acuan untuk perencanaan pembangunan Desa



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon melalui program dan kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa Mandiri	%	49,62%

Sumber data : Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan Program Prioritas Kabupaten mendukung pencapaian sasaran RPD, Rincian Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rincian pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Usulan	Pagu Murni	Pagu Pergeseran	Pagu Perubahan
02.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.339.098.543	3.055.458.995	2.865.208.795	2.885.508.074
02.09.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.727.800	48.727.800	21.790.000,	37.034.000
02.09.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	2.563.032.773	2.535.524.425	2.535.524.425	2.480.329.704
02.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
02.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.270.000	109.677.000	109.677.000	165.057.000
02.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.183.750	16.633.750	16.633.750	16.633.750
02.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.381.720	124.454.620	103.473.620	105.873.620
02.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.502.500	106.430.000	62.930.000	50.400.000



2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.412.266.800	657.752.600	561.780.200	561.780.200
62 13 02 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1.412.266.800	657.752.600	561.780.200	561.780.200
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	275.283.400	53.82.180	23.175.640	23.175.640
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	275.283.400	53.82.180	23.175.640	23.175.640
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.486.950.850	1.953.440.450	1.658.992.350	2.134.533.350
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.486.950.850	1.953.440.450	1.658.992.350	2.134.533.350
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.633.060.900	833.943.000	490.355.500	570.355.500
2 13 05 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.633.060.900	833.943.000	490.355.500	570.355.500
	TOTAL	10.146.660.493	6.554.419.225	5.599.512.485	6.175.352.764

Sumber data: Renja, DPA Murni, DPA Pergeseran, DPA Perubahan 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

C.Target Kinerja Tahun 2025

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun dalam satu dokumen tersendiri dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon tahun 2025 Dalam RKT tersebut telah disusun sasaran dan Target Kinerja OPD tahun 2025 beserta indikator kinerjanya. Dapat dilihat dalam tabel :

Tabel. 2.5 Sasaran Program dan kegiatan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pekon yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Program dan Anggaran	
				Tahun 2025	
				Target	Rp.
Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Pekon dengan status mandiri	49,62%	6.175.352.764



	dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif		Persentase Desa mandiri	49,62%	6.175.352.764
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	81 Poin	2.885.508.074
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	25 Dokumen	37.034.000
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	2.480.329.704
		Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	15.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	6 Sub Organisasi	165.057.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Organisasi	16.633.750
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	22 unit	105.873.620
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	100%	62.931.250
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	131 Pekon	50.400.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama antar pekon utk meningkatkan ekonomi masarakat	2,29 %	2.885.508.074
		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	1 Dokumen	37.034.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pekon Tertib Administrasi	100 %	2.480.329.704
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	393 dokumen	15.000.000



		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembangunan Desa		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	100 %	165.057.000
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan kapasitas Kelembagaan	4 Lembaga	16.633.750

Sumber Data : RKT tahun 2025 Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Pekon

D. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana tercapainya target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 5 maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan data yang relevan dengan setiap indikator kinerja sasaran. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Pekon Tahun 2025.

Persentase capaian kinerja dilakukan dengan membagi realisasi kinerja dengan target dengan rumus sebagai berikut ;

Capaian indikator kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi dan roda organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut:

Tabel 3.1 Data Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

NO	UNIT KERJA	Jumlah Pegawai		
		PNS	PPPK PENUH WAKTU	PPPK PARUH WAKTU
1.	Kepala Dinas	1		3
2.	Sekretariat	6	1	4
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon	6	1	3
4.	Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon	5	1	2
5.	Bidang Pemerintahan Pekon	6		3
		24	3	12

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Perencanaan Tahun 2025

Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa Jumlah Aparatur Struktural PNS di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sebanyak 43 Orang yang terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, 3 Orang PPPK Penuh Waktu dan 12 PPPK Paruh Waktu

Tabel 3.2 Data Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon menurut Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	8
5.	Penata (III/c)	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0



7.	Penata Muda (III/a)	7
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0
9.	Pengatur (II/c)	2
Jumlah ASN		24 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan 2025

Tabel 3.3
Data Pegawai Lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	5
2.	Sarjana (S1)	17
3.	Diploma III (D3)	2
4.	SLTA	0
Jumlah Aparatur		24Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Tabel 3.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkup Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Eselon II.c	1
2.	Eselon III.a	1
3.	Eselon III.b	3
4.	Eselon IV.a	2
5.	Jabatan Fungsional	6
Jumlah Aparatur		13 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan.

Tabel 3.5.
Jumlah Pejabat yang telah Mengikuti Diklat PIM di Lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Jabatan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	2
3.	Diklat PIM IV	6
Jumlah Aparatur		8 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Mini Bus Roda Empat : 2 Unit
2. Sepeda Motor : 6 Unit

Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :

1. Gedung : 1 Unit
2. Komputer : 5 Buah
2. Laptop : 8 Buah
3. Filling Kabinet : 9 Buah
4. Lemari : 8 Buah
5. Meja : 34 Buah
6. Kursi : 40 Buah
7. Printer : 5 Buah

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 5 program 9 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2025 dengan pagu DPA Murni sebesar Rp. **6.535.985.475,-**, yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.530.029.425,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.900.956.050,- Belanja Hibah Rp. 105.000.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 18.433.500,-

Terdapat Efisiensi Pengurangan dan penataan anggaran DPA Perubahan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2025 sebesar Rp. **379.066.461** (Belanja Pegawai penataan **55.194.721** dan Belanja Barang dan Jasa 323.871.740,-) sehingga total anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. **6.175.352.764,-** terdiri Belanja Pegawai Rp. 2.474.834.704 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.577.084.310 Belanja Hibah Rp. 105.000.000,- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 18.433.500,-



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Inspektur Lampung Barat Nomor: 700/LHE-71/II/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024

Catatan Rekomendasi LHE AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon:

- 1. Rumusan sasaran dan/ atau indikatornya pada beberapa perangkat daera belum menjawab isu strategis secara komprehensif yang seharusnya dikawal di tingkat pimpinan perangkat daerah, misalnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang hanya menetapkan“persentase Desa Mandiri
- 2. Dalam SK Petunjuk Teknis disertai penjelasan IKU, Perjanjian Kinerja dan Monitoring Evaluasi
- 3. Pemanfaatan hasil pengukuran Kinerja pegawai sesuai Perbup Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar Pemberian TPP

Tindak Lanjut LHE AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon:

- 1. Telah dibuat berita acara Rumusan sasaran /Indikator menjawab isu strategis (Perjenjangan Kinerja) diketahui Pimpinan Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
Jl.Tulip No.2, Kel.Way Menguku Kabupaten Lampung Barat 34811
Telepon (0828) 21158 Faks. (0828) 21158

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
CATATAN LHE SAKIP OLEH MENPAN RB tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Pada hari ini Senin tanggal 4 November 2024 telah dilakukan Rapat Pembahasan Catatan LHE Sakip oleh Menpan RB untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan hasil pembahasan :

- 1. Dasar :
Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 060/684/09/2024, tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Tindak Lanjut Catatan Hasil Evaluasi Akip Tahun 2024
- 2. Catatan dan Rekomendasi
“Rumusan sasaran dan/ atau indikatornya pada beberapa perangkat daerah belum menjawab isu strategis secara komprehensif yang seharusnya dikawal di tingkat pimpinan perangkat daerah, misalnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang hanya menetapkan “persentase Desa Mandiri “



Kata “meningkatkan kemandirian desa” ini belum cukup untuk kinerja kepala PD

Setelah dicermati Pohon kinerjanya disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan (narasi) sasaran strategis/intermediate outcome yg harus diperbaiki, indikator sudah baik,, Sasaran strategis “Meningkatnya Desa Mandiri”menurut evaluator belum menjawab isu dan permasalahan PD nya. Hal ini sudah jelas bahwa Tugas Pokok dan Fungsi DPMP bukan hanya Desa Mandiri, tetapi juga adanya tatakelola pemerintahan desa dan unsur pemberdayaan masyarakat yang harus lebih dfokuskan sebagai kinerja yang dikawal Kepala Perangkat Daerah.
- b. Untuk indikatornya sudah cukup mewakili kinerja Perangkat Daerah.

c. Kata “Terwujudnya” itu adalah narasi untuk “tujuan” PD atau level *Ultimate outcome*..agar menggunakan narasi “*meningkatnya*” untuk level *Intermediate outcome* nya.

d. Menyempurnakan Pohon Kinerja dengan membuat Penjenjangan Kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021, dimulai dari menjawab “permasalahan dan isu strategis” yang di Renstra, selanjutnya dibuat sesuai tahapan, dan diselaraskan dengan IKU dan PK nya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat,

Bukla, S Pd
Peminda Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001





CROSS CUTTING DINAS PEMBERDAYAAN DAN PEKON



2. SK Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang memuat Penjelasan IKU, Perjanjian Kinerja, dan Monitoring Evaluasi

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku No. 2, Liwa 34811
Telepon (0828) 21158 Faks. (0828) 21158

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ D7 - I /KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, serta dalam rangka perwujudan good governance, perlu dikembangkan dan diterapkan system pertanggung jawaban yang jelas, terukur dan efektif,

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 2005, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraesi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404).

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2) Kepala Perangkat Daerah menyusun Pedoman atau standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja beserta Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja

3) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja

4) Laporan Kinerja yang sudah diandatangani Kepala Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat melalui Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang akuntabilitas kinerja dengan lambutan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja

b. Dokumen lain yang dianggap perlu

Pasal 19

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 29 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BULUNI SPd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680915 199408 1 001



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jendera Bidang Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1/1117/Keuda tanggal 12 Maret 202025 hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dengan diberikannya TTP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksanaan kegiatan untuk ASN Daerah dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan kecuali yang didasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, pengelola keuangan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

1150

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttcl

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM.


SARJAK
NIP.197610202005011008



B. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	%	49,62%	51,90%	104,6%

Capaian kinerja yang mencapai 104,6% ditunjukan pada indikator Persentase Pekon Desa Mandiri, dengan capaian kinerja tersebut, Secara umum Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Pekon tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan/sasaran	Realisa si Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian % Tahun 2025
				Target	Realisasi	
Meningkatn ya Kualitas pemerintah Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa mandiri	48,09% %	49,62%	51,90%	104,6%

Sumber data : Surat Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2025

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Status desa mandiri yang menjadi pembanding dalam pengukuran desa mandiri ini diperoleh dari rilis data hasil pengukuran status desa yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT.

Indeks Desa merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan enam indeks Dimensi, yaitu indeks Dimensi Layanan dasar, Dimensi Ekonomi , Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Dasar hukum pelaksanaannya adalah Surat Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2025

Komponen yang dianalisis dalam pengukuran Indeks Desa antara lain:

a) Dimensi Layanan Dasar

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Utilitas Dasar

b) Dimensi Sosial, Sub Dimensi:

- 1) Aktivitas
- 2) Fasilitas Masyarakat

c) Dimensi Ekonomi, Sub Dimensi:

- 1) Produksi Desa
- 2) Fasilitas Pendukung Ekonomi



d) Dimensi Lingkungan, Sub Dimensi:

- 1). Pengelolaan Lingkungan
- 2). Penanggulangan Bencana

e) Dimensi Aksesibilitas Sub Dimensi:

- 1). Kondisi Akses Jalan
- 2). Kemudahan Akses

f) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa Sub Dimensi:

- 1). Kelembagaan dan Pelayanan Desa
- 2). Tata Kelola Keuangan Desa

Rumus Perhitungan IDM/ Metode Pengukuran

$$\text{Indeks Desa} = \frac{D1+D2+D3+D4+D5+D6}{635}$$

Penentuan Status Indeks Desa)

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 49,48\%$
2. Desa Tertinggal : $>49,49\% \leq 57,38\%$
3. Desa Berkembang : $>57,39\% \leq 69,34\%$
4. Desa Maju : $>69,35\% \leq 79,62\%$
5. Desa Mandiri : $> 79,63\%$

Analisis Terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2025 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif.

Persentase Desa Status Mandiri

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \\ &= \frac{68}{131} \times 100\% \\ &= 51,90\% \end{aligned}$$



Hasil perhitungan Indeks Desa lampung Barat 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, PDTT **Nomor 343 Tahun 2025** tentang Status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2025 data Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan status Pekon Berdasarkan Indeks Desa Membangun

PERKEMBANGAN STATUS PEKON											
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)											
NO	STATUS PEKON	TAHUN									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	MANDIRI	0	0	0	2	10	40	47	51	63	68
2	MAJU	1	2	2	30	44	61	63	64	57	49
3	BERKEMBANG	32	57	59	85	76	30	21	16	11	14
4	TERTINGGAL	72	62	61	14	1	0	0	0	0	0
5	SANGAT TERTINGGAL	26	10	9	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		131	131	131	131	131	131	131	131	131	131

Pada Tahun 2025, terdapat peningkatan status pekon sebagai berikut:

- a. pada Tahun 2025 **Desa Berkembang** bertambah **3 Desa**;
- b. Tahun 2025 penambahan sebanyak **5 Desa** dengan status "Mandiri" baru;
- c. Dapat disimpulkan pencapaian pekon Mandiri tahun 2025 sebanyak **68 pekon** dari target 65 pekon dengan pencapaian **104,6%** dari 131 Pekon di kabupaten lampung Barat.

Tahun 2025 Desa Berkembang bertambah 3 Desa dari 11 Desa menjadi 14 Desa, dikarenakan adanya Perubahan Indikator Penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi **Indeks Desa (ID)** yang semula 3 Variabel yang semula 3 Indikator IDM menjadi 6 Indikator ID, Penilaian Status Kemajuan dan Kemandirian Desa ditetapkan berdasarkan hasil pendataan Data Indeks Desa Tahun 2025 yang meliputi Dimensi Layanan dasar, Dimensi



Ekonomi , Dimensi Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pada masing-masing dari 6 Dimensi pembentuk Indeks Desa mengalami peningkatan pada rata-rata seluruh pekon. Beberapa hal yang mendorong peningkatan status desa ini diantaranya adalah kerja sama yang baik dengan perangkat daerah dan atau sektor terkait; partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pekon; meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan, mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan; optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk program pengentasan kemiskinan, mendorong diversifikasi ekonomi pekon dan pengembangan UMKM; melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola sumber daya alam dan konservasi lingkungan; mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pekon; melakukan monitoring dan pembinaan pekon; evaluasi berkala kinerja melalui aplikasi SaktiBerkibar.

Hal yang pasti terjadi adalah bahwa peningkatan status desa merupakan keberhasilan kinerja dari berbagai aspek yang sebagian besarnya menunjukkan perbaikan atau arah positif. Seperti pekon tangguh dan tanggap bencana, mudahnya akses logistik karena infrastruktur (terutama jalan) yang memadai, tingginya rata-rata lama sekolah, rendahnya angka kematian ibu dan bayi, proporsionalnya persebaran pusat perdagangan dan pasar, permukiman yang bersanitasi baik, dan lain sebagainya. Aspek-aspek ini dilaksanakan oleh penanggung jawab urusan masing-masing secara sadar sebagai tanggung jawab kerja yang kemudian keluaran dan dampaknya menjadi pembentuk apa yang menjadi kinerja Dinas PMP.

Sebaran status pekon mandiri, maju dan berkembang pada 15 kecamatan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Persebaran status pekon di 15 kecamatan				
No.	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang
1	Balik Bukit	7	3	
2	Sukau	3	5	2
3	Lumbok Seminung	4	5	2
4	Belalau	3	7	0
5	Suoh	5	1	1
6	Batu Brak	1	5	5
7	Pagar Dewa	6	3	1
8	Batu Ketulis	2	6	2
9	Sekincau	3	1	0
10	BNS	7	3	0



11	Sumber Jaya	3	2	0
12	Kebun Tebu	6	4	0
13	Way Tenong	8	0	0
14	Air Hitam	5	2	3
15	Gedung Surian	4	1	0

Sumber: Dinas PMP, 2025.

Dominasi status pekon mandiri dan pekon maju menggambarkan indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas informasi, serta modal sosial yang berada pada kondisi relatif baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pekon berkembang yang hanya 12,2% menginformasikan bahwa masalah sosial seperti akses **layanan dasar** dan partisipasi masyarakat tidak terlalu dominan, tapi masih memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi utama

1. **Layanan Dasar:** Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan Utilitas dasar dasar.

Dinas PMP melakukan monitoring dan Evaluasi Dana Desa, salah satu Positif Dampak Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa

Dinas PMP bekerja sama dan dukungan dengan Dinas PUPR dalam urusan Ketersediaan dan kemudahan infrastruktur yang menunjang layanan kesehatan dan Pendidikan. Sementara Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di Desa.

Dinas PMP bekerjasama dengan Stakeholder dan OPD terkait sistem pembuangan air limbah rumah tangga, Air Minum, Listrik, layanan telekomunikasi, Rumah Tidak Layak Huni.

Dinas PMP dan TNI dan masyarakat Pekon melalui kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa memfasilitasi pembangunan infrastruktur di pekon pekon terpilih.

2. **Sosial:** Tingkat partisipasi masyarakat, keamanan, dan kohesi sosial

Dinas PMP menganggarkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan beberapa kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat melaksanakan Gotong Royong, melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat melakukan Rakor Pokjanal Posyandu, KPM, LPM dan Karang taruna

Dinas PMP melakukan Koordinasi melalui Rakor Desa tentang Siskamling (Jaga Desa), Perpustakaan Desa, Penyelesaian Konflik Aparat dan Masyarakat Pekon.

3. **Ekonomi:** Kegiatan ekonomi lokal, pendapatan, dan kesempatan kerja

Dinas PMP melalui Rakor BUMPekon dan BUMDesa Bersama dan Monitoring BUMPekon dengan tujuan Memberikan daya kreativitas wirausaha dalam mengembangkan BUMDES dan UMKM di desa, Mengenalkan keragaman usaha BUMPekon yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa .

Dinas PMP juga mendorong pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pencegahan stunting. Melalui Kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga diharapkan Peran PKK dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga dalam: Mengorganisir Pelatihan, Mengembangkan Usaha Kecil, Mengakses Sumber Daya, meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Sosialisasi 131 Pekon. Dinas PMP melalui Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa telah melaksanakan Launching Perbup Tentang Pedoman Penyusunan APBPekon. Perbup tersebut menekankan anggaran Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan paling rendah 20% dilaksanakan berdasarkan Aspek Ketersediaan pangan, keterjangkauan, pemanfaatan. Dinas PMP juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan terkait Meningkatnya sarana transportasi antar desa dan pusat ekonomi.

4. **Lingkungan:** Pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan

Dinas PMP bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan nyaman dan bersih

Dinas PMP melalui Evaluasi dan Monitoring Dana Desa menghimbau kepada Pekon untuk melakukan pengelolaan Lingkungan, Sampah, Penanggulangan Bencana.

5. **Aksesibilitas:** Kondisi Akses Jalan dan Kemudahan Akses

Dinas PMP bekerjasama dengan Dinas PUPR tersedianya Pembangunan Infrastruktur jalan Desa

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 telah menetapkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana transportasi menjadi salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas masyarakat desa, terutama bagi wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti desa kepulauan dan daerah aliran sungai



6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa:** Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan desa

Dinas PMP melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Berikut ini disampaikan data pada masing-masing komponen pembentuk indeks desa.

NAMA DESA	SATUAN	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Scor	STATUS IDM 2025
KUBU PERAHU	Poin	155	81	155	86	47	71	93,7%	MANDIRI
PADANG CAHYA	Poin	155	77	155	76	47	71	91,5%	MANDIRI
SEBARUS	Poin	152	77	116	70	48	62	82,7%	MANDIRI
WAY EMPULAU ULU	Poin	169	80	136	78	48	53	88,8%	MANDIRI
GUNUNG SUGIH	Poin	169	80	139	60	48	61	87,7%	MANDIRI
WATES	Poin	169	80	128	24	46	57	79,4%	MANDIRI
PADANG DALOM	Poin	168	85	160	84	49	73	97,5%	MANDIRI
SUKARAME	Poin	131	66	98	55	47	68	73,2%	MAJU
BAHWAY	Poin	139	77	101	80	46	52	78,0%	MAJU
SEDAMPAH INDAH	Poin	131	82	112	82	38	78	82,4%	MAJU
SIMPANGSARI	Poin	139	46	99	62	39	59	69,9%	MANDIRI
SUKAJAYA	Poin	154	62	82	74	38	60	74,0%	MAJU
SINDANG PAGAR	Poin	154	62	82	74	38	60	74,0%	MAJU
SUKAPURA	Poin	140	84	133	78	47	76	87,9%	MANDIRI
WAY PETAI	Poin	149	63	142	68	49	71	85,4%	MANDIRI
KENALI	Poin	167	85	156	86	49	69	96,4%	MANDIRI



KEJADIAN	Poin	141	81	140	50	49	57	81,6%	MANDIRI
BUMI AGUNG	Poin	121	74	113	68	46	58	75,6%	MAJU
TURGAK	Poin	131	83	90	72	47	58	75,7%	MAJU
BEDUDU	Poin	130	73	93	70	40	70	75,0%	MAJU
SUKARAME	Poin	147	66	87	62	36	52	70,9%	MAJU
HUJUNG	Poin	139	76	135	76	40	70	84,4%	MANDIRI
SERUNGKUK	Poin	131	71	94	58	42	65	72,6%	MAJU
SUKA MAKMUR	Poin	124	79	113	64	36	58	74,6%	MAJU
FAJAR AGUNG	Poin	128	68	101	50	38	59	69,9%	MAJU
PURALAKSANA	Poin	153	72	122	64	49	74	84,1%	MANDIRI
KARANG AGUNG	Poin	157	77	122	74	49	66	85,8%	MANDIRI
MUTAR ALAM	Poin	158	82	117	84	49	72	88,5%	MANDIRI
TANJUNGRAYA	Poin	145	76	124	86	49	69	86,5%	MANDIRI
SUKANANTI	Poin	155	83	125	70	49	72	87,2%	MANDIRI
SUKARAJA	Poin	112	71	148	78	47	72	72,0%	MANDIRI
PADANG TAMBAK	Poin	136	61	122	69	48	79	81,1%	MANDIRI
TAMBAK JAYA	Poin	157	70	144	78	41	64	87,2%	MANDIRI
PAMPANGAN	Poin	158	63	139	76	47	63	86,0%	MANDIRI
WASPADA	Poin	141	60	139	70	49	72	83,6%	MANDIRI
TIGAJAYA	Poin	141	80	98	70	49	66	79,4%	MAJU
GIHAM SUKAMAJU	Poin	161	65	145	76	48	62	87,7%	MANDIRI
SUKA MARGA	Poin	132	53	139	86	49	73	83,8%	MANDIRI
SUMBER AGUNG	Poin	145	72	145	65	28	70	82,7%	MANDIRI
TUGU RATU	Poin	143	79	138	74	44	64	85,4%	MANDIRI
BANDING AGUNG	Poin	147	72	125	73	41	56	80,9%	MANDIRI
ROWO REJO	Poin	124	72	102	67	46	59	74,0%	MAJU



SIDO REJO	Poin	119	71	94	72	25	54	68,5%	BERKEMBANG
RINGIN SARI	Poin	140	80	111	74	41	77	82,4%	MANDIRI
KEMBAHANG	Poin	118	60	134	50	46	62	74,0%	MAJU
NEGERI RATU	Poin	101	55	71	68	43	47	60,6%	BERKEMBANG
KEGERINGAN	Poin	131	60	126	66	49	53	76,4%	MAJU
GUNUNG SUGIH	Poin	116	52	64	67	43	45	60,9%	BERKEMBANG
PEKON BALAK	Poin	136	60	132	66	49	72	81,1%	MANDIRI
SUKABUMI	Poin	141	60	126	66	49	53	78,0%	MAJU
CANGGU	Poin	127	60	126	66	49	52	75,6%	MAJU
KOTABESI	Poin	127	60	126	66	49	53	75,7%	MAJU
SUKARAJA	Poin	100	54	69	67	44	59	61,9%	BERKEMBANG
KERANG	Poin	116	52	64	67	43	45	60,9%	BERKEMBANG
TEBA LIOKH	Poin	99	54	93	62	46	53	64,1%	BERKEMBANG
TANJUNG RAYA	Poin	145	80	112	81	46	67	83,6%	MANDIRI
HANAKAU	Poin	143	80	136	67	42	59	83,0%	MANDIRI
BUAY NYERUPA	Poin	128	73	105	72	49	55	75,9%	MAJU
TAPAK SIRING	Poin	143	75	98	74	48	60	78,4%	MAJU
JAGA RAGA	Poin	144	74	88	72	40	65	76,1%	MAJU
PAGAR DEWA	Poin	160	76	97	76	47	57	80,8%	MANDIRI
SUKA MULYA	Poin	120	52	71	51	29	57	59,8%	BERKEMBANG
BANDAR BARU	Poin	114	58	116	75	42	60	73,2%	MAJU
BUMI JAYA	Poin	141	73	72	60	41	52	69,1%	BERKEMBANG
TEBA PERING JAYA	Poin	140	77	104	71	48	59	78,6%	MAJU
GEDUNG SURIAN	Poin	161	70	134	68	39	58	83,5%	MANDIRI
PURAMEKAR	Poin	143	77	112	76	48	73	83,3%	MANDIRI
CIPTAWARAS	Poin	147	78	110	70	42	69	81,3%	MANDIRI



TRIMULYO	Poin	131	81	153	84	47	68	88,8%	MANDIRI
MEKARJAYA	Poin	156	62	110	65	32	53	75,3%	MAJU
PURA JAYA	Poin	147	83	112	78	50	73	85,5%	MANDIRI
PURA WIWITAN	Poin	134	78	124	86	49	65	84,4%	MANDIRI
TRIBUDI SYUKUR	Poin	163	82	128	58	42	65	84,7%	MANDIRI
MUARA JAYA I	Poin	144	74	119	72	49	63	82,0%	MANDIRI
MUARA JAYA II	Poin	158	83	149	86	50	59	92,1%	MANDIRI
TRI BUDI MAKMUR	Poin	156	58	99	48	42	72	74,8%	MAJU
TUGU MULYA	Poin	146	74	106	50	41	61	75,3%	MAJU
CIPTA MULYA	Poin	148	49	100	58	41	64	72,4%	MAJU
MUARA BARU	Poin	133	83	116	84	49	68	83,9%	MANDIRI
SINAR LUAS	Poin	121	79	86	74	46	66	74,3%	MAJU
SIDODADI	Poin	136	78	117	86	42	67	82,8%	MANDIRI
SEMARANG JAYA	Poin	145	78	105	74	48	71	82,0%	MANDIRI
SUMBER ALAM	Poin	162	82	138	69	47	72	89,8%	MANDIRI
GUNUNGTERANG	Poin	149	85	126	77	42	79	87,9%	MANDIRI
SUKA JADI	Poin	132	73	66	76	42	61	70,9%	BERKEMBANG
SRI MENANTI	Poin	150	80	139	86	42	68	89,0%	MANDIRI
SINAR JAYA	Poin	121	85	108	82	41	67	79,4%	MAJU
RIGIS JAYA	Poin	117	73	64	78	42	73	70,4%	BERKEMBANG
SUKA DAMAI	Poin	117	73	64	78	42	73	70,4%	BERKEMBANG
MANGGARAI	Poin	118	68	103	73	39	60	72,6%	MAJU
PAHAYU JAYA	Poin	157	79	139	88	43	66	90,1%	MANDIRI
BASUNGAN	Poin	158	78	144	86	40	69	90,6%	MANDIRI
MEKAR SARI	Poin	137	79	134	80	48	64	85,4%	MANDIRI
SIDOMULYO	Poin	138	76	134	62	41	63	80,9%	MANDIRI



SIDODADI	Poin	126	50	98	68	42	68	71,2%	MAJU
MARGA JAYA	Poin	147	79	147	84	41	70	89,4%	MANDIRI
SUKA JAYA	Poin	149	75	115	86	41	67	83,9%	MANDIRI
BATU API	Poin	120	54	68	50	32	53	59,4%	BERKEMBANG
PAGAR DEWA	Poin	142	60	91	88	37	52	74,0%	MAJU
SUKA MULYA	Poin	145	68	112	64	40	64	77,6%	MAJU
ARGOMULYO	Poin	146	81	154	86	40	75	91,7%	MANDIRI
BATU KEBAYAN	Poin	141	79	113	84	46	56	81,7%	MANDIRI
ATAR BAWANG	Poin	128	78	102	82	37	67	77,8%	MAJU
CAMPANG TIGA	Poin	131	75	112	70	31	58	75,1%	MAJU
LUAS	Poin	138	75	102	74	45	46	75,6%	MAJU
BAKHU	Poin	137	77	106	58	45	66	77,0%	MAJU
WAY NGISON	Poin	116	76	101	58	33	71	71,7%	MAJU
KUBU LIKU JAYA	Poin	101	36	102	66	42	58	63,8%	BERKEMBANG
SUMBER REJO	Poin	131	60	118	82	42	58	77,3%	MAJU
ATAR KUWAU	Poin	113	61	81	78	30	70	68,2%	BERKEMBANG
LOMBOK	Poin	143	81	156	86	49	67	91,7%	MANDIRI
HENI ARONG	Poin	132	77	86	68	38	62	72,9%	MAJU
SUKA BANJAR	Poin	141	79	109	78	49	71	83,0%	MANDIRI
LOMBOK TIMUR	Poin	143	73	101	49	34	65	73,2%	MAJU
SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	Poin	104	51	79	54	42	63	61,9%	BERKEMBANG
SUKA MAJU	Poin	153	77	125	70	49	64	84,7%	MANDIRI
UJUNG	Poin	121	75	97	67	44	66	74,0%	MAJU
KEAGUNGAN	Poin	150	75	132	58	49	67	83,6%	MANDIRI
TAWAN SUKA MULYA	Poin	125	72	103	74	38	59	74,2%	MAJU
PANCUR MAS	Poin	81	76	76	74	45	51	63,5%	BERKEMBANG



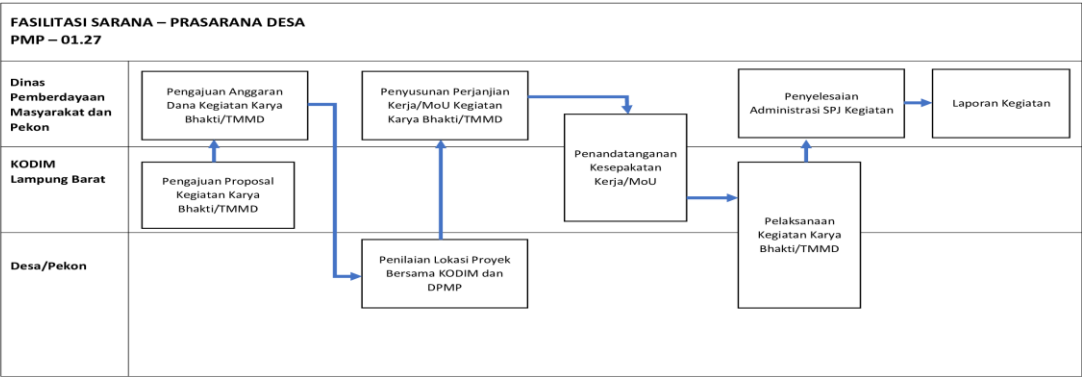
LOMBOK SELATAN	Poin	107	77	117	68	43	57	73,9%	MAJU
SUOH	Poin	139	70	144	56	36	67	80,6%	MANDIRI
SRIMULYO	Poin	138	67	143	69	44	67	83,1%	MANDIRI
BANDAR AGUNG	Poin	149	73	110	80	32	76	81,9%	MANDIRI
RINGIN JAYA	Poin	127	75	94	76	40	52	73,1%	MAJU
BUMI HANTATAI	Poin	148	55	88	59	37	60	70,4%	MAJU
GUNUNG RATU	Poin	159	83	134	74	45	62	87,7%	MANDIRI
TANJUNG SARI	Poin	141	77	134	80	31	69	83,8%	MANDIRI
NEGERI JAYA	Poin	122	73	104	64	37	73	74,5%	MAJU
TEMBELANG	Poin	150	71	103	80	46	66	81,3%	MANDIRI
TRI MEKAR JAYA	Poin	147	83	111	74	44	75	84,1%	MANDIRI
Jumlah	poin	18.103	9.384	14.896	9.311	5.650	8.345	103,34	
Rata	poin	138,19	71,63	113,71	71,08	43,13	63,70	0,79	

Pada tabel diatas Dimensi Layanan Dasar dan Dimensi Ekonomi memiliki scor yang baik

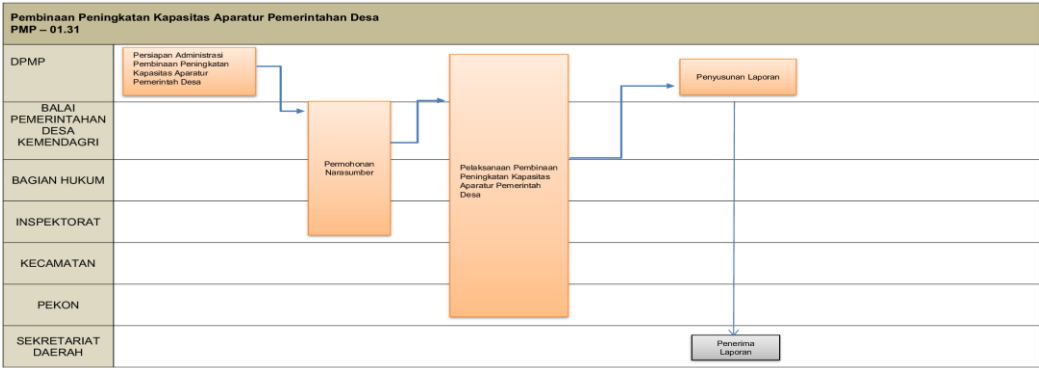
- Penentuan Status Indeks Desa)
- Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:
- 1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 49,48\%$
 - 2. Desa Tertinggal : $>49,49\% \leq 57,38\%$
 - 3. Desa Berkembang : $>57,39\% \leq 69,34\%$
 - 4. Desa Maju : $>69,35\% \leq 79,62\%$
 - 5. Desa Mandiri : $> 79,63\%$

Sementara gambaran peta proses kegiatan-kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat dalam bagan-bagan peta proses bisnis dibawah ini.

Gambar 4.1 Peta proses bisnis Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penatan Desa - Fasilitas sarana dan Prasarana



Gambar 4.1 Peta proses Program Administrasi Pemerintahan Pekon- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Pembinaan Peningkatas kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

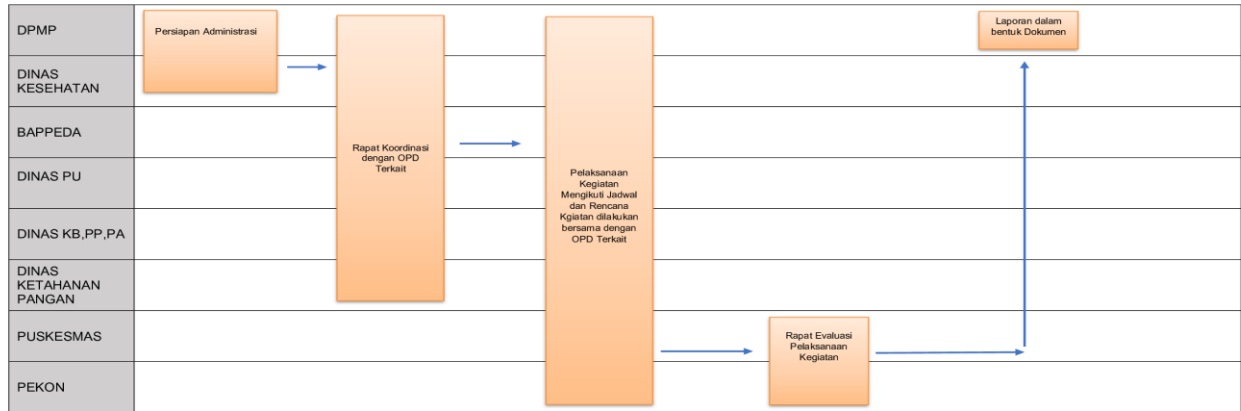


Gambar 4.3 Peta proses bisnis Program Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan, L lembaga Adar dan Masyarakat Hukum Adat



Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon)

PMP.01.40



Monitoring dan Evaluasi Dana Desa



Pembinaan Aparatur Pekon



Pembinaan Keuangan Desa



Rapat Penyusunan APBD Pekon

Launching Perbup APBD Pekon



Rapat Koordinasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun 2025



Bupati Lampung Barat Kumpulkan 15 Camat dan 131, Bahas Dana Desa Infrastruktur dan Bencana



Rakor Pengembangan Perpustakaan Desa



Rakor Pengembangan Perpustakaan Desa



Pembinaan dBumdes



Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan TMMD



Kegiatan Lembaga Penggerak Masyarakat



B. Perbandingan Kinerja

1. 1. Perbandingan Kinerja Tahun 2023, 2024 dengan Tahun 2025

Tabel 4.4 Capaian Kinerja 2022, 2023, 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Desa mandiri	%	37,40%	38,93%	39,69%	48,09%	49,62%	51,90%

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :Persentase Desa mandiri pada tahun 2025 sebesar 51,90% dari tahun sebelumnya tahun 2024 yaitu 48,09%, mengalami **kenaikan sebesar 3,8 %** sehingga perlu dilakukan **penyesuaian Target Indikator** tersebut.

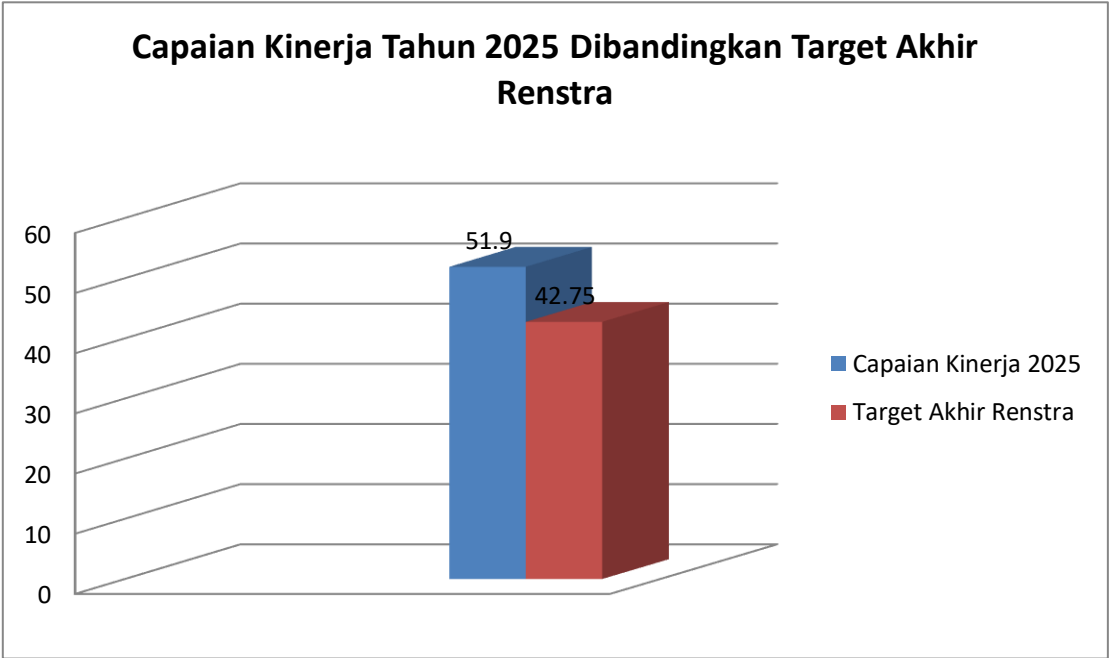
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Akhir Renstra

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun 2026
			Target	Realisasi		Target Akhir (%)
1	Prsentase Desa Mandiri	%	49,62%	51,90%	104,6%	42,75%

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon degan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2025 sebesar **51,90 %** yang mana target akhir renstra mencapai **42,75%** telah melampaui Target yang ditetapkan, dan perlu dilakukan **penyesuain Target Indikator** tersebut

Gambar 4.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Akhir Renstra



3.Target dan Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

bahwa pencapaian target tahunan indikator Persentase Desa Mandiri 51,90% tercapai pada triwulan III Tahun 2025

4.Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Desa PDTT

Tabel 4.5 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dengan Kementerian Desa PDTT

No	Indikator Kinerja	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2024-2025			Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2024-2025		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Peningkatan Capaian	Tahun 2024	Tahun 2025	Peningkatan Capaian
1.	Persentase Desa Mandiri (%)	48,09%	51,90%	3,8%	22,86%	27,24%	4,38%
2.	Jumlah desa Mandiri	63	67		17.203	20.503	
3.	Jumlah Pekon/Desa	131	131		75.265	75.265	

Sumber Data : Kementerian Desa PDTT



Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa dari indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dengan indikator **kinerja Persentase Desa mandiri** realisasi pada tahun 2025 sebesar **51,14 %** yang mana Kementrian Desa PDTT **27,24%**

4. Benchmarking

Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Persentase Desa Mandiri Provinsi Lampung Jika dibandingkan dengan Propinsi Lampung **51,14% / 22,93 %** selisih **28,21%,**.Prosentase Desa Madiri di Kabupaten Lampung Barat sudah Cukup Baik dan **Paling Banyak Desa Mandiri se Provinsi Lampung.**

C. Realisasi Anggaran

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.885.508.074	2.765.580.698	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.034.000.00	36.870.000.00	99.56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.105.000.00	17.941.000.00	99.09
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000.00	4.000.000.00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.595.000.00	3.595.000.00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.420.000.00	2.420.000.00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.760.000.00	3.760.000.00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.824.000.00	1.824.000.00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.330.000.00	3.330.000.00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.480.329.704.00	2.371.222.224.00	95.6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.834.704.00	2.365.727.224.00	95.59
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.355.000.00	1.355.000.00	100



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.350.000.00	2.350.000.00	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.790.000.00	1.790.000.00	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000.00	15.000.000.00	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000.00	15.000.000.00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.057.000.00	164.896.924.00	99.9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.165.000.00	4.150.000.00	99.64
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000.00	4.700.000.00	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.877.000.00	26.877.000.00	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.625.000.00	6.625.000.00	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.076.000.00	10.076.000.00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.614.000.00	112.468.924.00	99.87
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.633.750.00	16.633.750.00	100
	Pengadaan Mebel	6.633.750.00	6.633.750.00	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000.00	10.000.000.00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.573.620.00	100.233.175.00	94.94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000.00	6.000.000.00	95.24
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.590.000.00	19.613.055.00	90.84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.683.620.00	0.00	90.84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.580.000.00	60.724.625.00	92.6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.400.000.00	45.544.625.00	90.37
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.190.000.00	5.190.000.00	100



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000.00	9.990.000.00	100
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	561.780.200.00	561.763.650.00	100
	Penyelenggaraan Penataan Desa	561.780.200.00	561.763.650.00	100
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	561.780.200.00	561.763.650.00	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	23.175.640.00	23.175.640.00	100
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	23.175.640.00	23.175.640.00	100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	23.175.640.00	23.175.640.00	100
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.134.533.350.00	1.104.842.784.00	51.76
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.134.533.350.00	1.104.842.784.00	51.76
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.796.500.00	29.053.825.00	94.34
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	18.640.500.00	18.360.500.00	98.5
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	71.193.000.00	58.997.500.00	82.87
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	31.913.000.00	31.863.000.00	99.84
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	996.634.850.00	57.373.425.00	5.76
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	21.458.000.00	21.448.000.00	99.95
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	44.365.000.00	44.358.825.00	99,99
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	688.487.600.00	679.910.284.00	98.75
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	231.044.900.00	163.477.425.00	70.76
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	570.355.500.00	569.445.500.00	99.84



	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	570.355.500.00	569.445.500.00	99.84
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	83.876.100.00	83.826.100.00	99.94
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	48.222.800.00	48.072.800.00	99.84
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36.013.400.00	35.663.400.00	99.94
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	31.336.400.00	31.276.400.00	99.69
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	370.906.800.00	370.606.800.00	99.92
	Jumlah Anggaran	6.175.052.764.00	5.024.808.272.00	81,37

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan penegendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara Efisien dan bermanfaat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon serta untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi selanjutnya untuk acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan



pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

bahwa hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. bahan pertimbangan untuk menetapkan target kinerja, menentukan strategi atau kegiatan yang lebih baik pada tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Umum.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 anggaran Rp. **6.175.352.764,-** dengan jumlah program 5 program 9 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dari anggaran yang telah dianggarkan maka diakhir tahun 2025 teralisasi sebesar **Rp 5.024.808.272,-** atau **81,37 %**. **Tidak terserap Rp. 1.150.544.492,-**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat 2023 - 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari Empat tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 51,14 %

Indikator Tujuan yaitu Persentase Pekon dengan Status Mandiri pada tahun 2025 realisasi 51,14% dari target 49,629 % pekon Mandiri tahun 2025 sebanyak 67 pekon dengan pencapaian 103 % dari 131 Pekon di kabupaten lampung Barat

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 5.024.808.272,-** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah **81,378%** dari anggaran yang direncanakan, terdapat efisiensi sumberdaya pada tahun 2025 Capaian Indikator sebesar 51,14% hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan RPD **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dan sasaran

Strategis **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis Faktor pendukung keberhasilan

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mengemban Mewujudkan misi ke 3 yaitu Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
3. Adanya Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat
4. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
5. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Desa
6. Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lampung Barat 67 Desa/131 Jumlah Desa
7. Jumlah sarana dan Prasarana
8. pekon mandiri menunjukkan sebagian besar pekon telah memiliki **basis ekonomi Produktif**
9. Unggulnya hasil pertanian Teruma Kopi dan perkebunan, pengelolaan UMKM, dan pengelolaan BUMDes

C. Permasalahan

1. Infrastruktur Desa yang Terbatas
 - Masih banyak Desa yang menghadapi masalah,
 - terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih,
 - Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke layanan publik.

2..Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai

- Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Desa yang relatif rendah, - Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di Desa.
- Kemampuan aparatur Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan masih terbatas.

3..Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

- Sebagian besar masyarakat Desa masih hidup di bawah garis kemiskinan.
- Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi.
- Kesenjangan ekonomi antara masyarakat Desa dan perkotaan masih cukup tinggi.

4. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

- Kerusakan hutan, tanah, dan sumber daya air akibat eksploitasi yang berlebihan.
- Pencemaran lingkungan, seperti sampah dan limbah, yang belum tertangani dengan baik.
- Dampak perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian dan perikanan.

5 Partisipasi Masyarakat yang Rendah

- Kurangnya keterlibatan masyarakat Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa.
- Masih kuatnya dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan di Desa.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Upaya penyelesaian masalah dan rencana proyeksi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Dalam perencanaan selanjutnya, optimalisasi peningkatan jumlah status pekon akan didukung melalui pembentukan tim efektif capaian desa mandiri, tim percepatan capaian desa mandiri tingkat kabupaten, serta pemberian intensif tambahan dana desa untuk desa mandiri
1. Peningkatan Infrastruktur Desa dengan Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di Desa, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa.



2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa dengan Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan dan pendidikan, Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan SDM Desa.
3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program pengentasan kemiskinan, Mendorong diversifikasi ekonomi Desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa, Melibatkan masyarakat Desa dalam upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan memperkuat sistem demokrasi Desa dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Mendorong keterlibatan masyarakat Desa dalam setiap tahapan pembangunan.
6. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna melalui Aplikasi SAKTI BERKIBAR

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat,



Bulki, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024 triwulan IV

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	% Desa Mandiri	39,69%	39,69%	49,61%	49,61%	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa mandiri	39,69%	39,69%	49,61%	49,61%	Bulki, S.Pd

Liwa, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON



BULKI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Periode 2023 - 2026
TRIWULAN IV Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif Target	Keuangan Per triwulan Akumulatif Target	Nama Jabatan Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	tri 1 : 81 poin Trw 2 = 81 poin Trw 3 = 81 poin Trw 4 = 81 poin	923,589,579 1,985,599,564 2,607,366,934 3,055,458,995	SAHRIL, S.Pd.,MM
2		PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan pekon	Jumlah desa yang ditata dibagi Jumlah desa yang memenuhi syarat untuk	Trw 1 = 100 % Trw 2 = 100 % Trw 3 =100 % Trw 4 = 100 %	46,577,600 55,227,600 127,927,600 657,752,600	
3		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya Ekonomi Kerjasama Antar Pekon	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon	- - Trw 3 = 2,29% Trw 4 = 2,29%	13,384,180 32,574,180 53,824,180 53,824,180	
4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	meningkatkan Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	Trw 1 = 100 % Trw 2 = 100 % Trw 3 =100 % Trw 4 = 100 %	323,136,700 1,023,889,700 1,873,165,450 1,953,440,450	
5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Trw 1 = 65 % Trw 2 = 65% Trw 3 = 65% Trw 4 = 65%	270,142,000 671,105,000 776,124,000 833,943,000	ELPIN JAYA S.Sos.,MM

Liwa , 3 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON

BULKI, S. Pd

Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 8 Dokumen	37,958,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 16 Dokumen	43,502,800	
						Trw 3 = 24 Dokumen	48,727,800	
						Trw 4 = 25Dokumen	48,727,800	
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningatnya Administrasi Keuangan	Jumah Dokumen administrasi Kuangan yang disusun	Trw 1 = 5 Dokumen	708,784,209	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 5 Dokumen	1,558,085,894	
						Trw 3 = 5 Dokumen	2,124,983,764	
						Trw 4 = 5 Dokumen	2,537,538,825	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Administrasi	Trw 1 = 0	-	
						Trw 2 = 2 Dokumen	15,000,000	
						Trw 3 = 2 Dokumen	15,000,000	
						Trw 4 = 2 Dokumen	15,000,000	
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Administrasi umum	mlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan	Trw 1 = 8 Paket	85,621,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 8 Paket	195,642,500	
						Trw 3 = 8 Paket	205,017,000	
						Trw 4 = 8 Paket	206,674,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Junlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trw 1 = 2 laporan	16,633,750	
						Trw 2 = 2 laporan	16,633,750	
						Trw 3 = 2 laporan	16,633,750	

					Trw 4 = 2 laporan	16,633,750	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyedia jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 2 laporan	28,912,620	SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 2 laporan	90,804,620	
					Trw 3 = 2 laporan	110,824,620	
					Trw 4 = 2 laporan	124,454,620	
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Trw 1 = 22 Unit	45,680,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 22 Unit	65,930,000	
					Trw 3 = 22 Unit	86,180,000	
					Trw 4 = 22 Unit	106,430,000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumah Penyelenggaraan Penataan Desa	Trw 1 = 1 Unit	46,577,600	
					Trw 2 = 1 Unit	55,227,600	
					Trw 3 = 1 Unit	127,927,600	
					Trw 4 = 1 Unit	657,752,600	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	13,384,180	
					-	32,574,180	
					Trw 3 = 1 dokumen	53,824,180	
					Trw 4 = 1 dokumen	53,824,180	
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Trw 1 = 9 Sub Organisasi	323,136,700	FAUZAN ARIADI, SE.MM
					Trw 2 = 9 Sub Organisasi	1,023,889,700	
					Trw 3 = 9 Sub Organisasi	1,873,165,450	
					Trw 4 = 9 Sub Organisasi	1,953,440,450	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Trw 1 = 5 Sub organisasi	270,142,000	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
					Trw 2 = 5 Sub Organisasi	671,105,000	
					Trw 3 = Sub Organisasi	776,124,000	

			Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Trw 4 = Sub Organisasi	833,943,000	
--	--	--	--	---	--	------------------------	-------------	--

Liwa , 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON



BULKI, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

TRIWULAN IV

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab				
							Target	Target					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Pekon Secara Partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen	20,063,800	SAHRIL, S.Pd.,MM				
2							Trw 2 = 4Dokumen	20,063,800		Trw 3 = 6 Dokumen	20,063,800	Trw 4 = 8 Dokumen	20,063,800
3				Trw 1 = 1 dokumen	2,910,000	Trw 2 = 1 dokumen	6,825,000	Trw 3 = 1 dokumen	6,825,000	Trw 4 =1 dokumen	6,825,000		
4				Trw 1 = 1 dokumen	2,860,000	Trw 2 = 1 dokumen	2,860,000	Trw 3 = 1 dokumen	5,725,000	Trw 4 = 1 dokumen	5,725,000		
5				Trw 1 = 1 dokumen	2,600,000	Trw 2 = 1 dokumen	3,765,000	Trw 3 = 1 dokumen	3,765,000	Trw 4 = 1dokumen	3,765,000		
6				Trw 1 = 1 dokumen	5,050,200	Trw 2 = 1 dokumen	2,690,000	Trw 3 = 1 dokumen	5,050,000	Trw 4 = 1 dokumen	5,050,000		
7				Trw 1 = 1 Laporan	1,224,000	Trw 2 = 1 Laporan	2,299,000	Trw 3 = 1 Laporan	2,299,000	Trw 4 = 1 Laporan	2,299,000		
8				Trw 1 = 3 Laporan	3,250,000	Trw 2 = 6 Laporan	5,000,000	Trw 3 = 9 Laporan	5,000,000	Trw 4 = 12 Laporan	5,000,000		
9			Trw 1 = 26 Orang/Bulan	706,149,809	Trw 2 = 26 Orang/Bulan	1,550,786,494	Trw 3 = 26 Orang/Bulan	2,117,474,364	Trw 4 = 26 Orang/Bulan	2,530,029,425			
10			-		-	1,680,000							

			SKPD	Kuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Trw 3 = 1 laporan	1,890,000	
10			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	Trw 4 = 1 laporan	1,890,000	Eka Indriyanti, S.IP
11			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = 1 laporan	1,614,800	
						Trw 2 = 1 laporan	3,109,800	
						Trw 3 = 1 laporan	3,109,800	
						Trw 4 = 1 laporan	3,109,800	
						Trw 1 = 2 Dokumen	1,019,600	Eka Indriyanti, S.IP
						Trw 2 = 2 Dokumen	2,509,600	
						Trw 3 = 2 Dokumen	2,509,600	
						Trw 4 = 2 Dokumen	2,509,600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Trw 1 = 0			
						Trw 2 = 2 Dokumen	15,000,000	
						Trw 3 = 2 Dokumen	15,000,000	
						Trw 4 = 2 Dokumen	15,000,000	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Banguna Kantor	Trw 1 = 1 Paket	4,165,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 1 Paket	4,165,000		
					Trw 3 = 1 Paket	4,165,000		
					Trw 4 = 1 Paket	4,165,000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Trw 1 = 1 Unit	2,500,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 1 Unit	2,500,000		
					Trw 3 = 1 Unit	4,700,000		
					Trw 4 = 1 Unit	4,700,000		
15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Trw 1 = 9 Paket	17,960,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 9 Paket	32,567,500		
					Trw 3 = 9 Paket	35,010,000		
					Trw 4 = 9 Paket	35,010,000		
16		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Trw 1 = 1 Dokumen	1,656,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 1 Dokumen	3,312,000		
					Trw 3 = 1 Dokumen	4,968,000		
					Trw 4 = 1 Dokumen	6,625,000		
17		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Pasilitasi Kunjungan Tamu Perbulan	Trw 1 = 3 Laporan	3,000,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 6 Laporan	7,000,000		
					Trw 3 = 9 Laporan	10,076,000		
					Trw 4 = 12 Laporan	10,076,000		
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 12 Laporan	56,340,000		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 12 Laporan	146,098,000		
					Trw 3 = 12 Laporan	146,098,000		
					Trw 4 = 12 Laporan	146,098,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Trw 1 = 2 unit	6,633,750		SAHRIL, S.Pd.,MM
					Trw 2 = 2 unit	6,633,750		
					Trw 3 = 2 unit	6,633,750		

						Trw 4 =2 unit	6,633,750	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Trw 1 = 2 unit	10,000,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 2 unit	10,000,000	
						Trw 3 = 2 unit	10,000,000	
						Trw 4 =2 unit	10,000,000	
19		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Trw 1 = 1 Laporan	6,300,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 1 Laporan	6,300,000	
						Trw 3 = 1 Laporan	6,300,000	
						Trw 4 = 1 Laporan	6,300,000	
20			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang	Trw 1 =1 Laporan	5,000,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 1 Laporan	12,500,000	
						Trw 3 = 1 Laporan	18,590,000	
						Trw 4 = 1 Laporan	21,590,000	
21			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Triw 1 : 4 Laporan	17,612,620	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Triw 2 : 4Laporan	72,004,620	
						Triw 3 : 4 Laporan	85,934,620	
						Triw 4 : 4 Laporan	96,564,620	
22		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	Trw 1 = 8 Unit	30,500,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 8 Unit	50,750,000	
						Trw 3 = 8 Unit	71,000,000	
						Trw 4 = 8 Unit	91,250,000	
23			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang dpelihara	Trw 1 = 4 Unit	5,190,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 4 Unit	5,190,000	
						Trw 3 = 4 Unit	5,190,000	
						Trw 4 = 4 Unit	5,190,000	
24			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan	Trw 1 = 1Unit	9,990,000	SAHRIL, S.Pd.,MM
						Trw 2 = 1Unit	9,990,000	
						Trw 3 = 1 Unit	9,990,000	
						Trw 4 = 1 Unit	9,990,000	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya PenyelenggaraanPenataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Trw 1 = 1Unit	46,577,600	Desmon Irawan, ST.
						Trw 2 = 1Unit	55,227,600	
						Trw 3 = 1 Unit	127,927,600	
						Trw 4 = 1 Unit	657,752,600	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terselenggaraya Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan	Trw 1 = 1 Dokumen	13,384,180	Desmon Irawan, ST.
						tri 2 :	32,574,180	
						Trw 3 = 1Dok	53,824,180	
						Trw 4 = 1Dok	53,824,180	
25	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Trw 1 = 2 Dokumen	41,615,500	FAUZAN ARIADI, SE.MM
						Trw 2 = 2 Dokumen	43,488,500	
						Trw 3 = 2 Dokumen	56,463,500	

	AN DESA	Pemerintahan Desa		Pemboangunan Desa	Pemboangunan Desa	Trw 4 = 2 Dokumen	59,188,500	
26			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	Tri 1 : 2 Dokumen	9,894,000	FAUZAN ARIADI, SE.MM
						Triw 2 : 2 Dokumen	35,740,500	
						Triw 3 : 2 Dokumen	47,585,500	
						Triw 4 : 2 Dokumen	47,585,500	
27			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan peningkatan	Trw 1 = 60 Orang	17,130,500	FAUZAN ARIADI, SE.MM
						Trw 2 = 60 Orang	33,700,500	
						Trw 3 = 60 Orang	80,175,500	
						Trw 4 = 60 Orang	136,325,500	
			Pembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa	Terselenggaranya Pembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa	Jml Pembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa	Triw 1 : 1 Dokumen	19,980,500	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Triw 2 :1 Dokumen	48,771,000	
						Triw 3 :1 Dokumen	48,921,000	
						Triw 4 :1 Dokumen	48,921,000	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan Hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan pemberhentian	Triw 1 : 1 Laporan	120,299,600	
						Triw 2 :1 Laporan	651,283,600	
						Triw 3 :1 Laporan	1,168,777,850	
						Triw 4 :1 Laporan	1,168,777,850	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersleggaranya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Triw 1 : 0	-	FAUZAN ARIADI, SE.MM
						Triw 2 :136 Dokumen	4,135,000	
						Triw 3 :136 Dokumen	22,195,500	
						Triw 4 :136 Dokumen	43,595,500	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti	Trw 1 = '-	6,260,000	FAUZAN ARIADI, SE.MM
						Trw 2 ='-	49,000,000	
						Trw 3 = 105 orang	65,000,000	
						Trw 4 = 105 orang	65,000,000	
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Trw 1 = '-	5,730,200	Desmon Irawan, ST.
						Trw 2 ='-	25,044,200	
						Trw 3 = 10 Desa	251,278,200	
						Trw 4 = 10 Desa	251,278,200	
28			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evalusi perkembangan desa serta lomba desa dan	Trw 1 = 1 Dokumen	102,226,400	Desmon Irawan, ST.
						Trw 2 = 1 Dokumen	132,726,400	
						Trw 3 = 1 Dokumen	132,768,400	
						Trw 4 = 1 Dokumen	132,768,400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Trselenggaranya asilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu,	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Trw 1 = 2 Dokumen	90,521,500	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Trw 1 = 2 Dokumen	94,684,500	
						Trw 1 = 2 Dokumen	123,161,000	
						Trw 1 = 2 Dokumen	123,161,000	

29	MASYARAKAT T HUKUM ADAT	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan KapasitasKelembagaan LembagaKemasyarakata nDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan	Peningkatan KapasitasKelembagaan LembagaKemasyarakata nDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan	Jml Peningkatan KapasitasKelemb agaan LembagaKemasya rakatanDesa/Kel urahan (RT, RW,PKK, Posvandu, LPM	Trw 1 =4 Lembaga	30,063,000	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Trw 2 =4 Lembaga	80,921,000	
						Trw 3 =4 Lembaga	87,988,500	
						Trw 4 =4 Lembaga	87,988,500	
			Fasilitasi PemerintahDesa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	Meningkatnya Fasilitasi PemerintahDesa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi PemerintahDesa dalam PemanfaatanTekn ologi Tepat Guna	Trw 1 =1 Laporan	12,975,000	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Trw 2 = 1 Laporan	78,874,000	
						Trw 3 =1 Laporan	78,874,000	
						Trw 4 =1 Laporan	78,874,000	
			Fasilitasi Bulan BhaktiGotong RoyongMasyarakat	Terselenggaranya Fasilitasi Bulan BhaktiGotong RoyongMasyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan BhaktiGotong RoyongMasyaraka t	Trw 1 =1 Laporan	13,040,500	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Trw 2 = 1 Laporan	43,938,500	
						Trw 3 =1 Laporan	60,276,500	
						Trw 4 =1 Laporan	60,276,500	
			Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga	meningkatnya Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat danKesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyelengg araan GerakanPemberd ayaanMasyarakat danKesejahteraan Keluarga	Trw 1 = 1 Dokumen	123,542,000	ELPIN JAYA S.Sos.,MM
						Trw 2 = 1 Dokumen	372,687,000	
						Trw 3 = 1 Dokumen	425,824,000	
						Trw 4 = 1 Dokumen	483,643,000	

Liwa, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON

BULKI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BULKI, S.Pd.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAROSIL MABSUS
Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 20 Februari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
Tahun Anggaran : 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Pekon Secara Partisipatif	Persentase Desa Mandiri	49,62%

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.055.458.995 Dana Alokasi Umum
2 Program Penataan Desa	Rp 657.752.600 Dana Alokasi Umum
3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 53.824.180 Dana Alokasi Umum
4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 1.953.440.450 Dana Alokasi Umum
5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 833.943.000 Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 6.554.419.225

Liwa, 20 Februari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pekon Kabupaten Lampung Barat,





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BULKI, S.Pd.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 21 Februari 2025

Pihak Kedua,

BULKI, S.Pd., MM

NIP. 19690915 199408 1 001

Pihak Pertama,

SAHRIL, S.Pd., MM

NIP. 19690406 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}		{4}
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.055.458.995,00	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.727.800,00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 20.063.800,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.825.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.725.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.765.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.050.000,00	Dana Alokasi Umum
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.299.000,00	Dana Alokasi Umum
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.537.538.825,00	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.530.029.425,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.890.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 3.109.800,00	Dana Alokasi Umum
4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 2.509.600,00	Dana Alokasi Umum
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 15.000.000,00	
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dari Fungsi	Rp 15.000.000,00	Dana Alokasi Umum

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	206.674.000,00	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.165.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4.700.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	35.010.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.625.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	10.076.000,00	Dana Alokasi Umum
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	146.098.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	16.633.750,00	
1 Pengadaan Mebel	Rp	6.633.750,00	Dana Alokasi Umum
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	124.454.620,00	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	21.590.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	96.564.620,00	Dana Alokasi Umum
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	106.430.000,00	
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	91.250.000,00	Dana Alokasi Umum
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	5.190.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	9.990.000,00	Dana Alokasi Umum

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pekon Kabupaten Lampung Barat,



BULKI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Sekretaris Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,



SAHRIL, S.Pd., MM
Pembina TK.I
NIP. 19690406 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJI LESTARI, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 7 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SAHRIL, S.Pd.,MM

NIP. 19690406 199103 1 006

WIJI LESTARI, SE

NIP. 19780908 200212 2 003

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	20.063.800,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	6.825.000,00	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	5.725.000,00	Dana Alokasi Umum
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	3.765.000,00	Dana Alokasi Umum
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	5.050.000,00	Dana Alokasi Umum
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	2.299.000,00	Dana Alokasi Umum
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum
8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dari Fungsi	Rp	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.165.000,00	Dana Alokasi Umum
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4.700.000,00	Dana Alokasi Umum
11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	35.010.000,00	Dana Alokasi Umum
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.625.000,00	Dana Alokasi Umum
13 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	10.076.000,00	Dana Alokasi Umum
14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	146.098.000,00	Dana Alokasi Umum
15 Pengadaan Mebel	Rp	6.633.750,00	Dana Alokasi Umum
16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum
18 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	21.590.000,00	Dana Alokasi Umum

19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	96.564.620,00	Dana Alokasi Umum
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	91.250.000,00	Dana Alokasi Umum
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	5.190.000,00	Dana Alokasi Umum
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	9.990.000,00	Dana Alokasi Umum

Jumlah Anggaran

Rp 517.920.170,00

Sekretaris Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,



SAHRIL, S.Pd., MM

Pembina TK.I

NIP. 19690406 199103 1 006

Liwa, 26 Februari 2025
Kasubbag Umum dan Perencanaan,



WIJI LESTARI, SE

Penata TK.I

NIP. 19780908 202012 2 003

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
8	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan	3 Orang
9	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Paket

11	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9 Paket
12	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen
13	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
14	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
15	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket
16	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit
17	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
18	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik yang di sediakan	4 Laporan
19	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	4 Laporan
20	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit
21	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihar	10 Unit
22	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	19 Unit



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA INDRIYANTI, S.IP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAHRIL, S.Pd.,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

SAHRIL, S.Pd.,MM

NIP. 19690406 199103 1 006

Pihak Pertama,

EKA INDRIYANTI, S.IP

NIP. 19790212 200604 2 023

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

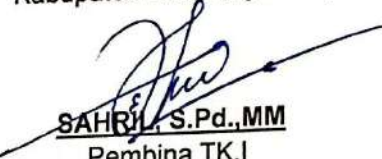
Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan
2	Tersedianya Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Keuangan Akhir tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggraan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggraan	2 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.530.029.425,00	Dana Alokasi Umum
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.890.000	Dana Alokasi Umum
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Rp 3.109.800	Dana Alokasi Umum
4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggraan	Rp 2.509.600	Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 2.537.538.825	

Sekretaris Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,


SAHRI, S.Pd.,MM
Pembina TK.I
NIP. 19690406 199103 1 006

Liwa, 28 Februari 2025
Kasubbag Keuangan
Dinas PMP Kab. Lampung Barat,


EKA INDRIYANTI, S.IP
Penata TK.I
NIP. 19790212 200604 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARAMITA ULIN, SE

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKA INDRIYANTI, S.IP

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

EKA INDRIYANTI, S.IP

NIP. 19790212 200604 2 023

Pihak Pertama,

PARAMITA ULIN, SE

NIP. 19910312 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan
2	Membantu Menyusun Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	1 Laporan
3	Membantu Menyusun Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggraan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggraan	2 Dokumen

Liwa, 28 Februari 2025

Kasubbag Keuangan
Dinas PMP Kab. Lampung Barat,



EKA INDRIYANTI, S.IP
Penata TK.I
NIP. 19790212 200604 2 023



PARAMITA ULI, SE
Penata Muda
NIP. 19910312 202012 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARLYN SA PARADIPTA PURI, SE
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIJI LESTARI, SE
Jabatan : Kasubbag Umum dan Perencanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

WIJI LESTARI, SE

NIP. 19780908 200212 2 003

Pihak Pertama,

ARLYNSA PRADIPTA PURI, SE
NIP. 19870518 202203 2 003

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Melaksanakan Administrasi Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
2	Membantu Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
3	Membantu Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Membantu Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5	Membantu Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Membantu Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
7	Membantu Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
8	Membantu Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan

Kasubbag Umum dan Perencanaan,


WIJI LESTARI SE

Penata TK.I

NIP. 19780908 202012 2 003

Liwa, 28 Februari 2025

STAF


ARLYNSA PRADIPTA PURI, SE

Penata Muda

NIP. 19870518 202203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BULKI, S.Pd.,MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

BULKI, S.Pd.,MM

NIP. 19690915 199408 1 001

Pihak Pertama,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM

NIP. 19800217 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%

	Anggaran	Keterangan
1 Program Administrasi Pemerintahan Desa		
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 59.188.500	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 47.585.500	Dana Alokasi Umum
3 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp 136.325.500	Dana Alokasi Umum
4 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp 43.595.500	Dana Alokasi Umum
5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp 65.000.000	Dana Alokasi Umum
6 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 1.168.777.850	
Jumlah Anggaran	Rp 1.520.472.850	

Kepala Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,


BULKI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Liwa, 18 Februari 2025

Kabid Pemerintahan Pekon,


FAUZAN ARIADI, SE., MM
Pembina
NIP. 19800217 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONIYANSAH, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

JONIYANSAH, S.IP
NIP. 19740610 200701 1 013

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp 59.188.500	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 47.585.500	Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 106.774.000	

Kabid Pemerintahan Pekon,



FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Pembina

NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



JONIYANSAH, S.IP

Penata

NIP. 19740610 200701 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKI INDRA SURYATAMA, A.Md
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM
Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 18 Februari 2025

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

OKI INDRA SURYATAMA, A.Md
NIP. 19891031 202012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu menyiapkan Dokumen terkait Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan
2	Membantu Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang

Kabid Pemerintahan Pekon,



FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Pembina

NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Pengadministrasi Keuangan,



OKI INDRA SURYATAMA, A.Md

Pengatur

NIP.19891031 202012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAWAN AMAMI, A.Md

Jabatan : Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

WAWAN AMAMI, A.Md
NIP. 19870826 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	105 Orang
2	Membantu Menyiapkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	136 Dokumen

Kabid Pemerintahan Pekon,



FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Pembina

NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 28 Februari 2025

Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa,



WAWAN AMAMI, A.Md

Pengatur

NIP. 19870826 202012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIAR SUKMADI, SE

Jabatan : Penata Laporan Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

TIAR SUKMADI
NIP. 19970112 202203 1 004

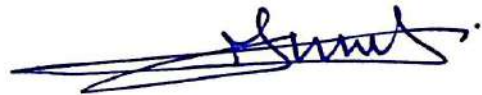
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan bahan Kegiatan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Bahan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Kabid Pemerintahan Pekon,



FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Pembina

NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Penata Laporan Keuangan



TIAR SUKMADI, SE

Penata Muda

NIP. 19970112 202203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi
Jabatan : Analis Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAN ARIADI, SE.,MM
Jabatan : Kabid Pemerintahan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

FAUZAN ARIADI, SE.,MM
NIP. 19800217 200804 1 001

Pihak Pertama,

DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi
NIP. 19960701 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan bahan Kegiatan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Bahan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen

Kabid Pemerintahan Pekon,



FAUZAN ARIADI, SE.,MM

Pembina

NIP. 19800217 200804 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Analisis Kesejahteraan Keluarga,



DELLA DAMAYANTI HERNAWAN, S.Psi

Penata Muda

NIP. 19960701 202203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BULKI, S.Pd.,MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

BULKI, S.Pd.,MM

NIP. 19690915 199408 1 001

Pihak Pertama,

DESMON IRAWAN, ST

NIP. 19731225 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Meningkatnya Penataan Pekon	Persentase Desa yang Memenuhi Syarat Penataan Desa yang ditata	7,63%
2	Meningkatnya Kerja Sama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Pekon untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat	2,29%

Program Penataan Desa	Anggaran	Keterangan
1 Program Penataan Desa		
1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp 657.752.600	Dana Alokasi Umum
2 Program Peningkatan Kerja Sama Desa		
1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 53.824.180	Dana Alokasi Umum
3 Program Administrasi Pemerintahan Desa		
1 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 251.278.200	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 132.768.400	Dana Alokasi Umum
Jumlah	Rp 1.095.623.380	

Kepala Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,

BULKI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690915 199408 1 001

Liwa, 28 Februari 2025
Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,

DESMON IRAWAN, ST
Pembina
NIP. 19731225 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELISA, SE

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, ²⁰ Februari 2025

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST

NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

ELISA, SE

NIP. 19830516 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

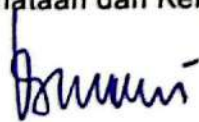
: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 53.824.180	Dana Alokasi Umum
2 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 132.768.400	Dana Alokasi Umum
	Rp 186.592.580	

Liwa, 28 Februari 2025

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,



DESMON IRAWAN, ST
Pembina
NIP. 19731225 200312 1 004

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



ELISA, SE
Penata
NIP. 19830516 201001 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos.,MM

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST

NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos.,MM

NIP. 19791013 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit
2	Terfasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Pekon

Sub Kegiatan

- 1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- 2 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

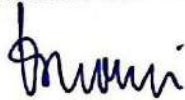
Anggaran

Rp	657.752.600	Dana Alokasi Umum
Rp	251.278.200	Dana Alokasi Umum
Rp	909.030.800	

Keterangan

Liwa, 28 Februari 2025

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,

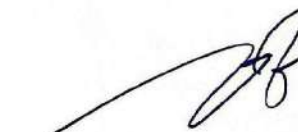


DESMON IRAWAN, ST

Pembina

NIP. 19731225 200312 1 004

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,



EDWIN OKTA FERNANDES, S.Sos., MM

Penata

NIP. 19791013 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUSY DIAN IRVETA, S.A.N

Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 20 Februari 2025

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST
NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

LUSY DIAN IRVETA, S.A.N
NIP. 19920712 202203 2 008

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Desa

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,



DESMON IRAWAN, ST

Pembina

NIP. 19731225 200312 1 004

Liwa, 28 Februari 2025
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan,



LUSY DIAN IRVETA, S.A.N

Penata Muda

NIP. 19920712 202203 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESMON IRAWAN, ST

Jabatan : Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Kedua,

DESMON IRAWAN, ST

NIP. 19731225 200312 1 004

Pihak Pertama,

NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

NIP. 19930418 202203 1 003

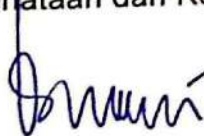
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Pekon
2	Membantu Menyiapkan Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen

Kabid Penataan dan Kerja Sama Pekon,



DESMON IRAWAN, ST

Pembina

NIP. 19731225 200312 1 004

Liwa, 28 Februari 2025
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan,



NICKO TAMPANI ANHAR, SKM

Penata Muda

NIP. 19930418 202203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BULKI, S.Pd.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BULKI, S.Pd.,MM
NIP. 19690915 199408 1 001

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

{1}	{2}	{3}	{4}
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	70%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Dana Alokasi Umum
1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 123.161.000	Dana Alokasi Umum
2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 87.988.500	Dana Alokasi Umum
3 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 78.874.000	Dana Alokasi Umum
4 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 60.276.500	Dana Alokasi Umum
5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 483.643.000	Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 833.943.000	

2 Program Administrasi Pemerintahan Desa

1 Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Jumlah Anggaran

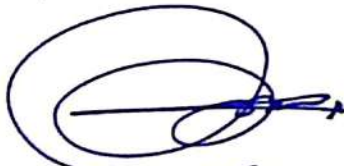
Total

Rp 48.921.000 Dana Alokasi Umum

Rp 48.921.000

Rp 882.864.000

Kepala Dinas PMP
Kabupaten Lampung Barat,



BULKI, S.Pd.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690915 199408 1 001

Liwa, 28 Februari 2025

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,



ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIA AKFRIA JULIA NASIR, S. STP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 18 Februari 2025

Pihak Pertama,


RIA AKFRIA JULIA NASIR, S. STP
NIP. 19850221 200312 2 002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

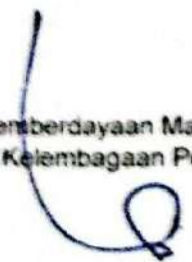
Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Tertaksananya Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan
2	Tertaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 78.874.000	Dana Alokasi Umum
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 48.921.000	Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 127.795.000	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,


RIA AKFRIA JULIA NASIR, S.STP

Penata TK.I

NIP. 19850221 200312 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN, S.IP

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,

GUNAWAN, S.IP

NIP. 19800227 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 60.276.500	Dana Alokasi Umum
Jumlah Anggaran	Rp 60.276.500	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,


GUNAWAN, S.IP

Penata

NIP. 19800227 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

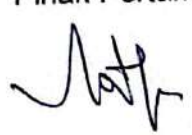
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025

Pihak Pertama,


NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si
NIP. 19931112 201507 2 001

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga
2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

- Sub Kegiatan**
- 1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Anggaran

Anggaran	Keterangan
Rp 123.161.000	Dana Alokasi Umum
Rp 87.988.500	Dana Alokasi Umum
Rp 483.643.000	Dana Alokasi Umum
Rp 694.792.500	

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
Penata
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda,

NOVA CHRISTINA, S.IP.,M.Si
Penata
NIP. 19931112 201507 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON**

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI ELWIDA, SE

Jabatan : Analis Kesejahteraan Keluarga

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 18 Februari 2025

Pihak Pertama,

SUSI ELWIDA, SE
NIP. 19910312 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Banyaknya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga
2	Membantu Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Banyaknya Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
3	Membantu Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Banyaknya Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,

ELPIN JAYA, S.Sos., MM
Penata
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025

Analisis Kesejahteraan Keluarga

SUSI ELWIDA, SE
Penata Muda TK.I
NIP. 1983115 201001 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos
Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 28 Februari 2025

Pihak Pertama,


MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos
NIP. 19970803 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,

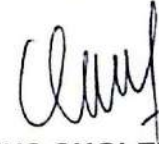

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025

Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan,


MAR'ATUS SHOLEHA, S.Sos

Penata Muda

NIP. 19970803 202012 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEKON

Komplek Perkantoran Pemda Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOADDIN, S.Sos

Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kab. Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ELPIN JAYA, S.Sos.,MM
NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025

Pihak Pertama,

TOADDIN, S.Sos
NIP. 19910312 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
: 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}	{4}
1	Membantu Menyiapkan Bahan Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen
2	Membantu Menyiapkan Bahan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 Dokumen

Kabid Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelembagaan Pekon,


ELPIN JAYA, S.Sos.,MM

Penata

NIP. 19790906 200604 1 007

Liwa, 20 Februari 2025

Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan,


TOADDIN, S.Sos

Penata TK.I

NIP. 19710515 200903 1 001



SALINAN

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 343 TAHUN 2025
TENTANG**

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2025, perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan hasil pendataan indeks desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KODE DESA	DESA	DIMENSI LATIHAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)/6	12
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042004	PADANG CAHYA	155	77	155	76	47	71	91,50	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042005	SEBARUS	152	77	116	70	48	62	82,68	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042006	WAY EMPULAU ULU	169	80	136	78	48	53	88,82	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042007	GUNUNG SUGIH	169	80	139	60	48	61	87,72	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042008	WATES	169	80	128	74	46	57	87,24	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042009	PADANG DALOM	168	85	160	84	49	73	97,48	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042010	SUKARAME	131	66	98	55	47	68	73,23	MAJU
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042011	BAHWAY	139	77	101	80	46	52	77,95	MAJU
LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	1804042012	SEDAMPAH INDAH	131	82	112	82	38	78	82,36	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	1804052001	SIMPANGSARI	135	75	132	82	45	57	82,83	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	1804052010	SUKAJAYA	139	46	99	62	39	59	69,92	MAJU
LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	1804052011	SINDANG PAGAR	154	62	82	74	38	60	74,02	MAJU
LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	1804052012	SUKAPURA	140	84	133	78	47	76	87,87	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	1804052013	WAY PETAI	149	63	142	68	49	71	85,35	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062001	KENALI	167	85	156	86	49	69	96,38	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062002	KEJADIAN	141	81	140	50	49	57	81,57	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062003	BUMI AGUNG	121	74	113	68	46	58	75,59	MAJU
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062004	TURGAK	131	83	90	72	47	58	75,75	MAJU
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062005	BEDUDU	130	72	93	70	40	70	74,80	MAJU
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062006	SUKARAME	147	66	87	62	36	52	70,57	MAJU
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062007	HUJUNG	139	76	135	76	40	70	84,41	MANDIRI
LAMPUNG BARAT	BELALAU	1804062013	SERUNGKUK	131	71	94	58	42	65	72,60	MAJU



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN PEKON**

Jalan Tulip Nomor 03 Telp (0728) 21158, Liwa 34573

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan **September** Tahun **2025** bertempat di:

1. Kabupaten : Kabupaten Lampung Barat
2. Provinsi : Lampung

Telah dilakukan Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kabupaten hasil dari pendataan Indeks Desa (ID) Tahun 2025 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan Tim Verifikasi dan validasi yang melibatkan :

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Barat
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Barat
3. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Barat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

disahkan Tim Verifikasi dan Validasi

Plt. Sekretaris Bappeda
Kabupaten Lampung Barat


ERIC ENRICO S.Hut., M.T
Nip. 19720505 199303 1 005

Kepala DPMD
Kabupaten Lampung Barat


BULKI, S.Pd
Nip.19690915 199408 1 001

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten Lampung Barat


ELIDA, SE
Korkab

REKAPAPITULASI INDEKS DESA (ID) TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

NO	KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS ID 2025
1	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042002	KUBU PERAHU	MANDIRI
2	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042004	PADANG CAHYA	MANDIRI
3	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042005	SEBARUS	MANDIRI
4	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042006	WAY EMPULAU ULU	MANDIRI
5	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042007	GUNUNG SUGIH	MANDIRI
6	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042008	WATES	MANDIRI
7	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042009	PADANG DALOM	MANDIRI
8	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042010	SUKARAME	MAJU
9	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042011	BAHWAY	MAJU
10	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180404	BALIK BUKIT	1804042012	SEDAMPAH INDAH	MANDIRI
11	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052001	SIMPANGSARI	MANDIRI
12	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052010	SUKAJAYA	MAJU
13	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052011	SINDANG PAGAR	MAJU
14	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052012	SUKAPURA	MANDIRI
15	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180405	SUMBER JAYA	1804052013	WAY PETAI	MANDIRI
16	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062001	KENALI	MANDIRI
17	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062002	KEJADIAN	MANDIRI
18	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062003	BUMI AGUNG	MAJU
19	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062004	TURGAK	MAJU
20	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062005	BEDUDU	MAJU
21	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062006	SUKARAME	MAJU
22	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062007	HUJUNG	MANDIRI
23	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062013	SERUNGKUK	MAJU
24	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062019	SUKA MAKMUR	MAJU
25	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180406	BELALAU	1804062020	FAJAR AGUNG	MAJU
26	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072002	PURALAKSANA	MANDIRI
27	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072003	KARANG AGUNG	MANDIRI
28	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072004	MUTAR ALAM	MANDIRI
29	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072005	TANJUNGRAYA	MANDIRI
30	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072006	SUKANANTI	MANDIRI
31	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072007	SUKARAJA	MANDIRI
32	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072008	PADANG TAMBAK	MANDIRI
33	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180407	WAY TENONG	1804072009	TAMBAK JAYA	MANDIRI
34	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082001	PAMPANGAN	MANDIRI

35	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082006	WASPADA	MANDIRI
36	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082007	TIGAJAYA	MAJU
37	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180408	SEKINCAU	1804082008	GIHAM SUKAMAJU	MANDIRI
38	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092003	SUKA MARGA	MANDIRI
39	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092004	SUMBER AGUNG	MANDIRI
40	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092005	TUGU RATU	MANDIRI
41	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092006	BANDING AGUNG	MANDIRI
42	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092010	ROWO REJO	MAJU
43	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092017	SIDO REJO	BERKEMBANG
44	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180409	SUOH	1804092018	RINGIN SARI	MANDIRI
45	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102001	KEMBAHANG	MAJU
46	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102002	NEGERI RATU	BERKEMBANG
47	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102003	KEGERINGAN	MAJU
48	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102004	GUNUNG SUGIH	BERKEMBANG
49	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102005	PEKON BALAK	MANDIRI
50	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102006	SUKABUMI	MAJU
51	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102007	CANGGU	MAJU
52	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102008	KOTABESI	MAJU
53	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102009	SUKARAJA	BERKEMBANG
54	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102010	KERANG	BERKEMBANG
55	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180410	BATU BRAK	1804102011	TEBA LIOKH	BERKEMBANG
56	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112001	TANJUNG RAYA	MANDIRI
57	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112002	HANAKAU	MANDIRI
58	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112003	BUAY NYERUPA	MAJU
59	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112004	TAPAK SIRING	MAJU
60	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112005	JAGA RAGA	MAJU
61	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112009	PAGAR DEWA	MANDIRI
62	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112012	SUKA MULYA	BERKEMBANG
63	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112018	BANDAR BARU	MAJU
64	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112019	BUMI JAYA	BERKEMBANG
65	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180411	SUKAU	1804112020	TEBA PERING JAYA	MAJU
66	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152001	GEDUNG SURIAN	MANDIRI
67	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152002	PURAMEKAR	MANDIRI
68	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152003	CIPTAWARAS	MANDIRI
69	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152004	TRIMULYO	MANDIRI
70	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180415	GEDUNG SURIAN	1804152005	MEKARJAYA	MAJU
71	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182001	PURA JAYA	MANDIRI
72	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182002	PURA WIWITAN	MANDIRI

73	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182003	TRIBUDI SYUKUR	MANDIRI
74	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182004	MUARA JAYA I	MANDIRI
75	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182005	MUARA JAYA II	MANDIRI
76	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182006	TRI BUDI MAKMUR	MAJU
77	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182007	TUGU MULYA	MAJU
78	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182008	CIPTA MULYA	MAJU
79	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182009	MUARA BARU	MANDIRI
80	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180418	KEBUN TEBU	1804182010	SINAR LUAS	MAJU
81	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192001	SIDODADI	MANDIRI
82	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192002	SEMARANG JAYA	MANDIRI
83	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192003	SUMBER ALAM	MANDIRI
84	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192004	GUNUNGTERANG	MANDIRI
85	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192005	SUKA JADI	MAJU
86	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192006	SRI MENANTI	MANDIRI
87	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192007	SINAR JAYA	MAJU
88	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192008	RIGIS JAYA	MAJU
89	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192009	SUKA DAMAI	BERKEMBANG
90	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180419	AIR HITAM	1804192010	MANGGARAI	MAJU
91	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202001	PAHAYU JAYA	MANDIRI
92	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202002	BASUNGAN	MANDIRI
93	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202003	MEKAR SARI	MANDIRI
94	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202004	SIDOMULYO	MANDIRI
95	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202005	SIDODADI	MAJU
96	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202006	MARGA JAYA	MANDIRI
97	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202007	SUKA JAYA	MANDIRI
98	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202008	BATU API	BERKEMBANG
99	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202009	PAGAR DEWA	MAJU
100	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180420	PAGAR DEWA	1804202010	SUKA MULYA	MAJU
101	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212001	ARGOMULYO	MANDIRI
102	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212002	BATU KEBAYAN	MANDIRI
103	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212003	ATAR BAWANG	MAJU
104	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212004	CAMPANG TIGA	MAJU
105	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212005	LUAS	MAJU
106	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212006	BAKHU	MAJU
107	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212007	WAY NGISON	MAJU
108	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212008	KUBU LIKU JAYA	BERKEMBANG
109	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212009	SUMBER REJO	MAJU
110	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180421	BATU KETULIS	1804212010	ATAR KUWAI	BERKEMBANG

111	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222001	LOMBOK	MANDIRI
112	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222002	HENI ARONG	MAJU
113	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222003	SUKA BANJAR	MANDIRI
114	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222004	LOMBOK TIMUR	MAJU
115	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222005	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	BERKEMBANG
116	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222006	SUKA MAJU	MANDIRI
117	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222007	UJUNG	MAJU
118	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222008	KEAGUNGAN	MANDIRI
119	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222009	TAWAN SUKA MULYA	MAJU
120	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222010	PANCUR MAS	BERKEMBANG
121	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180422	LUMBOK SEMINUNG	1804222011	LOMBOK SELATAN	MAJU
122	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232001	SUOH	MANDIRI
123	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232002	SRIMULYO	MANDIRI
124	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232003	BANDAR AGUNG	MANDIRI
125	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232004	RINGIN JAYA	MAJU
126	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232005	BUMI HANTATAI	MAJU
127	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232006	GUNUNG RATU	MANDIRI
128	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232007	TANJUNG SARI	MANDIRI
129	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232008	NEGERI JAYA	MAJU
130	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232009	TEMBELANG	MANDIRI
131	18	LAMPUNG	1804	LAMPUNG BARAT	180423	BANDAR NEGERI SUOH	1804232010	TRI MEKAR JAYA	MANDIRI

Di sahkan Team Verifikasi

